

Hadra Mulina

(1) Pengungkapan Publik dan Transparansi Anggaran: Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Daer...

-  Akuntansi
-  Fak. Ekonomi & Bisnis
-  LLDIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3457283635

Submission Date

Jan 14, 2026, 2:05 PM GMT+7

Download Date

Jan 14, 2026, 2:19 PM GMT+7

File Name

Artikel20Hadra202_-_Hadra_Mulina.pdf

File Size

751.2 KB

15 Pages

5,635 Words

38,987 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 9% Internet sources
- 10% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.lembagakita.org	<1%
2	Internet	repository.iainsasbabel.ac.id	<1%
3	Internet	adoc.pub	<1%
4	Publication	Salma Bilbina. "Peran Adaptive Selling Dalam Meningkatkan Salesperson Perfor...	<1%
5	Publication	Hilda Nur Amalia, Anwar Ramli, Rezky Amalia Hamka, Agung Widhi Kurniawan, Z...	<1%
6	Internet	jurnal.kemendagri.go.id	<1%
7	Internet	j-innovative.org	<1%
8	Publication	Ali Mundzir. "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivit...	<1%
9	Internet	journal.irsc.co.id	<1%
10	Internet	journals.upi-yai.ac.id	<1%
11	Internet	jptam.org	<1%

12	Internet	jurnal.risetilmiah.ac.id	<1%
13	Publication	Aldi Riyanto, Yulia Tri Kusumawati, Praja Hadi Saputra. "Pengaruh Kompensasi d...	<1%
14	Publication	Anastasia Wea, Sari Rahmadhani. "Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Dampak Parti...	<1%
15	Internet	eprints.unisnu.ac.id	<1%
16	Internet	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
17	Internet	repository.bunghatta.ac.id	<1%
18	Publication	Mahfud Jailani Aminulloh, Mastina Maksin, Maulidia Gita Lestari. "Pengaruh Kual...	<1%
19	Publication	Novia Sibarani, Eri Bukhari. "Pengaruh Financial Leverage Dan Operating Levera...	<1%
20	Internet	ejournal.warunayama.org	<1%
21	Publication	William Victorio, Agustina Agustina. "Peran Kecanduan Game Online terhadap Re...	<1%
22	Internet	eprints.unmas.ac.id	<1%
23	Internet	jurnal.kdi.or.id	<1%

Pengungkapan Publik dan Transparansi Anggaran: Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Keterbukaan Informasi Publik dan Sosialisasi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 100 responden melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan transparansi sebagai faktor dominan. Informasi fiskal yang mudah diakses, tepat waktu, dan responsif, serta sosialisasi anggaran yang efektif, terbukti meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik, sementara secara praktis memberikan bukti empiris untuk memperkuat strategi komunikasi fiskal pemerintah daerah.

Kata kunci: transparansi, sosialisasi anggaran, kepuasan masyarakat, tata kelola fiskal, akuntansi sektor publik

ABSTRACT

This study investigates the influence of Public Information Transparency and Budget Socialization on Public Satisfaction with regional financial management in North Luwu Regency. Using a quantitative explanatory design, data were collected from 100 respondents through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results show that both transparency and budget socialization significantly affect public satisfaction, with transparency emerging as the dominant variable. The findings indicate that accessible, timely, and responsive fiscal information, supported by effective communication of budget policies, enhances community trust and satisfaction. This study contributes theoretically by integrating transparency and fiscal literacy into public sector accounting discourse, and practically by offering empirical evidence for improving fiscal communication strategies at the local government level.

Keywords: transparency, budget socialization, public satisfaction, fiscal governance, public sector accounting

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kedua prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai standar normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsi fiskalnya secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan data dan integritas fiskal, praktik transparansi fiskal dan sosialisasi anggaran menjadi semakin strategis dalam membangun kepercayaan publik. Kajian yang dilakukan oleh (Sawir et al., 2025), yang dipublikasikan dalam *Jurnal of Public Policy*, menunjukkan bahwa transparansi fiskal, opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti penelitian (Sari & Novitasari, 2022a) menemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan persepsi kinerja pemerintah di Jawa Tengah.

Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk penguatan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan integrasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masih terdapat kesenjangan empiris mengenai sejauh mana keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran memengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat di tingkat daerah. Beberapa studi di Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung memusatkan perhatian pada hubungan antara transparansi pelaporan keuangan atau indikator audit dengan opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, penelitian (Saputri et al., 2024) yang fokus pada analisis determinan pengungkapan laporan keuangan daerah menunjukkan faktor-faktor seperti ukuran pemerintah, komitmen pimpinan, dan karakteristik fiskal yang memengaruhi tingkat keterbukaan informasi keuangan daerah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa aspek transparansi seperti aksesibilitas informasi dan responsivitas pemerintah masih dinilai cukup, sedangkan efektivitas sosialisasi anggaran khususnya frekuensi dan tingkat pemahaman masyarakat belum optimal. Dengan demikian, diperlukan penelitian empiris yang menguji bagaimana kedua variabel tersebut secara simultan memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan lain ditunjukkan oleh (Caronge et al., 2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan informasi melalui mekanisme digital dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan secara signifikan dalam laporan keberlanjutan.

Kabupaten Luwu Utara telah mengupayakan peningkatan keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran melalui PPID dan SIPD, namun hingga kini belum tersedia kajian empiris kuantitatif yang mengukur pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh (Suryanto & Kurniati, 2025) membuktikan bahwa sistem akuntansi sektor publik dan transparansi anggaran meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (*Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*), sedangkan studi (Sari & Novitasari, 2022) menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan mencerminkan kinerja pemerintah daerah (*Journal of Local Government Issues*). Berdasarkan teori legitimasi publik, transparansi fiskal dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran berpotensi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. Oleh karena itu, kekosongan data kuantitatif di Luwu Utara menjadi peluang penting bagi penelitian yang mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan tata kelola keuangan daerah yang lebih partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, penelitian ini berupaya menilai pengaruh simultan kedua variabel terhadap tingkat kepuasan publik, sekaligus mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh dominan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik dengan mengintegrasikan dimensi transparansi dan literasi fiskal dalam menjelaskan public satisfaction. Secara praktis, penelitian ini menyediakan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi komunikasi fiskal yang lebih efektif, inklusif, dan akuntabel.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Public Accountability Theory* dalam Konteks Akuntansi Sektor Publik**

Akuntabilitas publik merupakan konsep fundamental dalam akuntansi sektor publik, menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan secara transparan, tepat waktu, dan dapat diaudit (Hidayat, 2024). Dalam perspektif akuntansi publik, akuntabilitas tidak hanya dipahami melalui penyajian laporan keuangan, tetapi juga melalui bagaimana pemerintah mengkomunikasikan informasi fiskal, merumuskan kebijakan anggaran secara terbuka, dan merespons kebutuhan Masyarakat (Sari & Muslim, 2023). Pandangan ini diperkuat oleh berbagai studi yang menekankan bahwa akuntansi sektor publik berperan sebagai instrumen komunikasi fiskal dan transparansi, bukan sekadar pencatatan transaksi (Siahay, 2023b). Lebih lanjut, efektivitas akuntabilitas pemerintah

daerah sangat dipengaruhi oleh keterbukaan data, partisipasi publik, serta responsivitas pemerintah dalam proses penganggaran (Santoso & Sulisnaningrum, 2024).

Penelitian internasional menegaskan bahwa akuntabilitas fiskal yang baik meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi (Karfina et al., 2025). Penelitian di dalam negeri menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan data anggaran dan pelaporan keuangan secara transparan dan mudah diakses publik. Sebagai contoh, penelitian (Badewin et al., 2025) menemukan bahwa sistem e-government dan kontrol internal yang kuat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, (Nurhadianto & Sugiri, 2022) menunjukkan bahwa variabel seperti otonomi daerah dan opini audit BPK juga berperan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Fiskal

Transparansi fiskal merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan *good governance* di tingkat pemerintahan daerah karena membuka ruang pengawasan publik yang lebih efektif terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. (Yuniar & Firmansyah, 2023), melalui analisis panel data pada 349 pemerintah daerah selama periode 2016–2019, menemukan bahwa tingkat otonomi fiskal dan investasi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal. Pengaruh tersebut menjadi semakin kuat ketika kesehatan fiskal daerah dimasukkan sebagai variabel moderasi, yang menunjukkan bahwa kapasitas keuangan yang stabil dan pengelolaan investasi yang produktif merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keterbukaan anggaran secara optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Suryanto & Kurniati, 2025) yang menyimpulkan bahwa integrasi sistem akuntansi sektor publik dengan transparansi anggaran mampu menjelaskan sebesar 68,2% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara keandalan sistem pencatatan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi publik, dan ketersediaan informasi fiskal yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selain aspek fiskal dan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi turut memainkan peran strategis dalam mendorong transparansi. (Hidayat, 2024), dalam kajiannya mengenai implementasi *e-government* di Kota Surabaya, menemukan bahwa penerapan sistem informasi publik yang terintegrasi secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Peningkatan tersebut terjadi melalui kemudahan akses informasi, percepatan arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta terbukanya ruang partisipasi publik secara real-time, yang pada akhirnya memperkuat kontrol sosial dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.

H₁: Keterbukaan informasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan Kabupaten Luwu Utara.

Budget Socialization: Partisipasi, Literasi Fiskal, dan Akuntansi Publik

Dalam kerangka akuntansi sektor publik, sosialisasi anggaran dalam bentuk transparansi dokumen anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan serta pengawasan anggaran berperan penting dalam meningkatkan literasi fiskal publik (Nasution & Lutfi, 2022), karena keterlibatan dan keterbukaan tersebut memberi masyarakat akses informasi yang memadai untuk memahami, mengevaluasi, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan anggaran secara lebih efektif dan bertanggung jawab (Nurhalisa et al., 2024). Sebagai contoh, penelitian di tingkat desa oleh (Saragih et al., 2025) menunjukkan bahwa ketika pemerintah desa membuka akses anggaran dan melibatkan warga dalam proses anggaran, masyarakat menjadi lebih sadar dan memahami alokasi serta penggunaan anggaran desa, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

Selain partisipasi formal, efektivitas sosialisasi anggaran juga ditentukan oleh tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang disampaikan. penelitian (Azizah et al., 2025) menunjukkan bahwa pemahaman informasi keuangan yang memadai berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap individu dalam merespons kebijakan dan risiko keuangan, di mana sikap tersebut berperan sebagai mekanisme kognitif yang memengaruhi persepsi dan penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan, dengan demikian sosialisasi anggaran yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga edukatif berpotensi membentuk sikap positif masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selaras dengan temuan tersebut, (Affandi et al., 2023) dalam kajian implementasi *participatory budgeting in Indonesia* menyatakan bahwa proses penganggaran yang melibatkan masyarakat terbukti memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, studi (Purwanti et al., 2024) melalui platform CosmoGov menegaskan bahwa *participatory budgeting* berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

H₂: Sosialisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan Kabupaten Luwu Utara.

Public Satisfaction dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

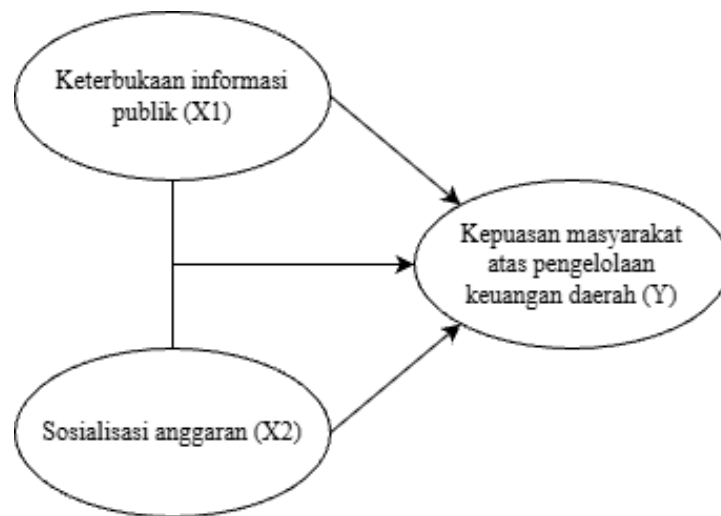
Kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan outcome penting dalam akuntansi sektor publik karena menggambarkan persepsi masyarakat atas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, seperti yang dikemukakan oleh Studi (Lukas et al., 2024) mengonfirmasi bahwa kualitas layanan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, khususnya dalam konteks pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu, (Ramadhan & Pribadi, 2024) menyoroti peran literasi digital dan kualitas layanan *e-government* dalam membentuk tingkat kepuasan warga negara tentang sistem layanan kependudukan berbasis elektronik seperti SIAK yang menunjukkan aspek kemudahan penggunaan (*user-friendly*) dan aksesibilitas sistem informasi publik berperan besar dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah.

Penelitian lintas sektor oleh (Prakoso & Rismawati, 2023) menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dan kolaborasi yang efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan individu terhadap organisasi, sementara faktor motivasional tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten, temuan ini mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dan interaksi yang jelas, terbuka, serta mudah dipahami lebih menentukan kepuasan dibandingkan dorongan internal semata. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, hal ini menguatkan argumentasi bahwa keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran sebagai bentuk komunikasi fiskal pemerintah berpotensi meningkatkan kepuasan masyarakat.

Selain temuan sebelumnya, Penelitian (Hasibuan et al., 2025) menemukan bahwa ketika pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, yang implikasinya adalah tingkat kepuasan publik juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan publik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas interaksi layanan publik yang dirasakan masyarakat secara langsung, seperti ketersediaan informasi, aksesibilitas layanan, dan responsivitas pemerintah terhadap keluhan dan aspirasi Masyarakat (Kamela, 2025).

H₃: Keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan Kabupaten Luwu Utara.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei eksplanatori karena, secara metodologis, explanatory survey memungkinkan pengujian hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen dalam satu titik waktu melalui instrumen kuantitatif dan analisis statistik (M. Sari et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik masyarakatnya yang semakin aktif dalam menerima dan menilai informasi fiskal daerah. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Juli hingga Oktober 2025 agar selaras dengan siklus kebijakan anggaran daerah dan ketersediaan responden.

Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang berpotensi terpapar informasi fiskal dan memiliki kapasitas untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden berusia minimal 18 tahun, berdomisili di Kabupaten Luwu Utara setidaknya satu tahun terakhir, serta memiliki pengalaman menerima informasi anggaran atau terlibat dalam forum publik. Ukuran sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* menggunakan populasi 254.851 jiwa dan *margin of error* 10%, sehingga diperoleh jumlah minimum 100 responden. Jumlah ini dinilai memadai untuk mendukung kebutuhan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat atas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Tabel 1. Analisis Deskriptif Keterbukaan Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata	Keterangan
1	Aksesibilitas Informasi	3,22	Cukup Setuju
2	Ketersediaan Informasi	3,56	Setuju
3	Transparansi Prosedural	3,62	Setuju
4	Responsivitas terhadap Permintaan	3,75	Setuju

Rata-rata	3,54	Setuju
-----------	------	--------

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik (X1) berada pada kategori setuju dengan rata-rata 3,54. Indikator tertinggi adalah responsivitas terhadap permintaan informasi (3,75), diikuti transparansi prosedural (3,62) dan ketersediaan informasi (3,56). Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyampaian informasi dinilai cukup jelas dan pemerintah daerah dianggap responsif dalam menyediakan informasi publik.

Sebaliknya, aksesibilitas informasi memperoleh nilai terendah (3,22), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi kendala dalam menjangkau informasi, baik dari sisi saluran penyebaran maupun literasi digital. Secara keseluruhan, keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu Utara sudah berada pada tingkat yang baik, namun peningkatan aksesibilitas tetap diperlukan agar informasi dapat dijangkau secara merata oleh seluruh masyarakat.

Deskriptif Sosialisasi Anggaran Terhadap Kepuasan Masyarakat atas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Tabel 2. Analisis Deskriptif Sosialisasi Anggaran

No.	Indikator	Rata-rata	Keterangan
1	Frekuensi Sosialisasi	3,30	Cukup Setuju
2	Metode Penyampaian Informasi	3,75	Setuju
3	Keterlibatan Masyarakat	3,73	Setuju
4	Pemahaman Masyarakat terhadap Anggaran	3,08	Cukup Setuju
Rata-rata		3,47	Setuju

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sosialisasi anggaran (X2) berada pada kategori setuju dengan rata-rata 3,47. Indikator dengan nilai tertinggi adalah metode penyampaian informasi (3,75), diikuti keterlibatan masyarakat (3,73), yang mencerminkan bahwa strategi komunikasi pemerintah sudah cukup efektif dan masyarakat merasa cukup dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

Namun demikian, frekuensi sosialisasi hanya memperoleh skor 3,30 dan pemahaman masyarakat terhadap anggaran menjadi indikator terendah (3,08). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi belum berlangsung secara intensif dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi anggaran masih terbatas, terutama karena kompleksitas informasi fiskal dan disparitas literasi masyarakat.

Secara keseluruhan, sosialisasi anggaran di Kabupaten Luwu Utara dinilai cukup baik, tetapi masih perlu diperkuat melalui peningkatan frekuensi kegiatan dan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pemahaman publik secara lebih mendalam. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Deskriptif Kepuasan Masyarakat atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Y)

Tabel 3. Analisis Deskriptif Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator	Rata-rata	Keterangan
-----	-----------	-----------	------------

1	Persepsi terhadap Penggunaan Dana Publik	3,43	Setuju
2	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan	3,71	Setuju
3	Kepuasan atas Hasil Pembangunan	3,36	Cukup Setuju
4	Kepercayaan terhadap Pemerintahan Daerah	3,68	Setuju
Rata-rata		3,54	Setuju

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat (Y) berada pada kategori setuju dengan rata-rata 3,54. Indikator tertinggi adalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat (3,71), yang mencerminkan bahwa sebagian besar program pembangunan dinilai relevan dan memberikan manfaat nyata. Indikator kepercayaan terhadap pemerintah daerah juga tinggi (3,68), menunjukkan persepsi positif terhadap integritas pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

Indikator persepsi terhadap penggunaan dana publik memperoleh skor 3,43, menandakan bahwa masyarakat menilai pengelolaan dana publik cukup transparan meskipun belum sepenuhnya optimal, khususnya terkait kejelasan alokasi dan pemerataan manfaat. Adapun skor terendah terdapat pada kepuasan atas hasil pembangunan (3,36), yang mengindikasikan bahwa kualitas dan dampak pembangunan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah berada pada level positif, namun peningkatan pada aspek hasil pembangunan dan optimalisasi penggunaan dana publik masih diperlukan agar kepuasan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pengujian Kualitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* antara skor setiap item dengan total skor variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Hasil <i>r</i> hitung	Keterangan
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0.545 – 0.824, Sig. 0,10%	Semua item valid
Sosialisasi Anggaran (X2)	0.492 – 0.862, Sig. 0,10%	Semua item valid
Kepuasan Masyarakat (Y)	0.494 – 0.867, Sig. 0,10%	Semua item valid

Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas pada seluruh variabel penelitian, diperoleh bahwa nilai *r*-hitung masing-masing item memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan *r*-tabel (0,195). Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan **valid**, sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	16	0.952	Reliabel

Sosialisasi Anggaran (X2)	16	0.949	Reliabel
Kepuasan Masyarakat (Y)	16	0.951	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, semua instrumen dinyatakan reliabel, sehingga mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria statistik yang diperlukan sebelum dilakukan analisis lanjutan.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Uji	Statistic	Sig.	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov	0,134	<.001	Normal
Shapiro-Wilk	0,903	<.001	Normal

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Meskipun demikian, distribusi residual tetap dianggap memenuhi asumsi normalitas karena pola grafik P-P Plot menunjukkan sebaran residual yang mengikuti garis diagonal, sehingga model layak untuk digunakan dalam regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIP	Keterangan
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0,119	8.396	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Anggaran (X2)	0,119	8.396	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk kedua variabel independen berada pada angka 0,119 dan nilai VIF sebesar 8,396. Kedua nilai ini masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk penelitian sosial yang menggunakan konstruk berhubungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas yang mengganggu.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0.184	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Anggaran (X2)	0.285	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Pada uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi untuk variabel keterbukaan informasi publik (0,184) dan sosialisasi anggaran (0,285) berada di atas ambang 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, sehingga varians residual bersifat homogen. Secara keseluruhan, seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan dapat digunakan untuk analisis regresi

linear berganda secara valid dan reliabel.

Hasil Analisis Regresi

Bagian ini menyajikan hasil estimasi model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2) terhadap kepuasan masyarakat (Y). Analisis dilakukan melalui serangkaian uji yang meliputi uji simultan (F-test), uji parsial (t-test), analisis koefisien regresi, serta pengukuran koefisien determinasi (R^2). Penyajian hasil tidak bersumber langsung dari output SPSS, tetapi menampilkan nilai-nilai kunci yang relevan untuk menjelaskan kekuatan model dan kontribusi masing-masing variabel independen.

Secara umum, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran mampu memengaruhi variasi kepuasan masyarakat serta apakah model regresi yang digunakan layak (fit) secara statistik. Hasil analisis selanjutnya dijelaskan melalui tabel-tabel pendukung yang mencakup uji simultan, uji parsial, serta besaran koefisien determinasi untuk memperkuat interpretasi mengenai hubungan antarvariabel.

Tabel 9. Persamaan regresi

Model	B
Constant	3.030
X1	.577
X2	.379

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil estimasi persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

1. Konstanta (a) = 0,189
2. Koefisien X1 = 0,577
3. Koefisien X2 = 0,379

$$Y = 0,189 + 0,577X_1 + 0,379X_2$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan model sebagai berikut: $Y = 0.189 + 0.577X_1 + 0.379X_2$. Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2) berkontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat. Koefisien X1 sebesar 0,577 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada keterbukaan informasi publik meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 0,577, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sementara itu, koefisien X2 sebesar 0,379 menandakan bahwa sosialisasi anggaran juga memberikan pengaruh positif meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan X1.

Tabel 10. Hasil Uji parsial (t-test)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	3.030	2.561		1.183	.240
X1	.577	.127	.563	4.553	<.001
X2	.379	.131	.358	2.898	.005

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Variabel keterbukaan informasi publik (X1) memiliki

koefisien sebesar 0,577 dengan nilai $t = 4,553$ dan $p < 0,001$, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Demikian pula, sosialisasi anggaran (X2) berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,379, nilai $t = 2,898$, dan $p = 0,005$. Temuan ini mengindikasikan bahwa baik keterbukaan informasi publik maupun sosialisasi anggaran berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 11. Hasil Uji simultan (F-test)

F	Sig.
226.238	<.001 ^b

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa nilai F sebesar 226,238 dengan signifikansi $< 0,001$, sehingga model regresi dinyatakan layak. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi kepuasan masyarakat secara kuat dan signifikan pada konteks pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 12. Nilai koefisien determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
.907 ^a	.823	.820

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,823, yang berarti keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2) mampu menjelaskan 82,3% variasi kepuasan masyarakat, sementara 17,7% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,820 yang hampir identik menunjukkan bahwa model regresi stabil dan memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik.

Tingginya koefisien determinasi ($>80\%$) mengindikasikan bahwa transparansi informasi dan efektivitas sosialisasi anggaran merupakan faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Dengan demikian, model regresi dinilai layak dan mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara kuat, menegaskan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Interpretasi Hasil Statistik

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu keterbukaan informasi publik (X1) dan sosialisasi anggaran (X2), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Y). Nilai koefisien regresi yang positif menandakan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel independen akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Secara khusus, koefisien terbesar terdapat pada X1, yang berarti keterbukaan informasi publik merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dibandingkan sosialisasi anggaran.

Signifikansi statistik pada uji t memperkuat bahwa pengaruh tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan konsisten dan dapat digeneralisasi pada populasi penelitian. Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan, karena X1 dan X2 secara simultan berkontribusi terhadap perubahan Y. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel bekerja secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi kepuasan masyarakat.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,823 memberikan bukti kuat bahwa sebagian besar variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh keterbukaan informasi dan sosialisasi anggaran. Tingginya nilai ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan

prediktif yang sangat baik. Sementara 17,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain, temuan tersebut tetap menunjukkan bahwa perbaikan transparansi informasi dan peningkatan kualitas sosialisasi anggaran merupakan kunci dalam meningkatkan kepuasan publik.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan literatur terdahulu yang menekankan pentingnya transparansi fiskal dan partisipasi publik dalam memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memiliki kekuatan statistik, tetapi juga relevansi teoritis dan praktis dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

Pembahasan

H1 menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara. Temuan ini secara langsung mengonfirmasi *Public Accountability Theory*, yang menempatkan transparansi informasi sebagai prasyarat utama terwujudnya akuntabilitas pemerintah kepada publik (Hidayat, 2024; R. Sari & Muslim, 2023).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, keterbukaan informasi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen komunikasi fiskal yang memungkinkan masyarakat menilai proses, keputusan, dan hasil pengelolaan keuangan daerah (Siahay, 2023). Hasil deskriptif yang menunjukkan tingginya skor pada indikator responsivitas dan transparansi prosedural mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan fungsi akuntabilitas informasional sebagaimana ditekankan dalam kajian teori.

Temuan ini selaras dengan pandangan (Santoso & Sulisnaningrum, 2024) yang menyatakan bahwa transparansi fiskal memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika informasi keuangan disajikan secara jelas, mudah diakses, dan responsif, masyarakat tidak hanya memahami penggunaan anggaran, tetapi juga merasa diakui sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat kepuasan masyarakat terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

H2 menyatakan bahwa sosialisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Pengujian hipotesis kedua (H2) membuktikan bahwa sosialisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan kerangka teori yang menempatkan partisipasi dan literasi fiskal sebagai elemen penting dalam akuntabilitas publik (Nasution & Lutfi, 2022; Nurhalisa et al., 2024).

Dalam kajian teori, sosialisasi anggaran dipahami sebagai proses edukatif yang menjembatani kompleksitas informasi fiskal dengan kapasitas pemahaman masyarakat. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa meskipun metode penyampaian dan keterlibatan masyarakat dinilai baik, frekuensi sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat masih relatif rendah. Kondisi ini memperkuat argumen teoritis bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya dengan keterbukaan dokumen, tetapi harus disertai dengan proses komunikasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami (Siahay, 2023).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Saragih et al., 2025) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi anggaran meningkatkan kesadaran publik terhadap alokasi dan penggunaan dana, yang pada akhirnya berdampak pada persepsi positif terhadap pemerintah. Dengan demikian, sosialisasi anggaran berfungsi sebagai instrumen pendukung transparansi, yang memperkuat pemahaman, partisipasi, dan

kepuasan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam kerangka akuntabilitas publik.

H3 menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

publik dan sosialisasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan kemampuan penjelasan model yang sangat tinggi ($R^2 = 0,823$). Temuan ini mempertegas konstruksi teoritis bahwa akuntabilitas publik bersifat multidimensional, mencakup keterbukaan informasi dan kualitas komunikasi fiskal secara bersamaan (Hidayat, 2024; Karfina et al., 2025).

Dalam kerangka akuntansi sektor publik, transparansi menjelaskan apa dan bagaimana anggaran dikelola, sementara sosialisasi menjelaskan mengapa kebijakan fiskal diambil dan bagaimana masyarakat dapat terlibat. Kombinasi kedua aspek ini menciptakan sistem akuntabilitas yang utuh, sebagaimana ditegaskan oleh (Nurhadianto & Sugiri, 2022) bahwa transparansi tanpa partisipasi berisiko menjadi formalitas, sedangkan partisipasi tanpa keterbukaan kehilangan substansi.

Oleh karena itu, temuan simultan ini memperkuat teori akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang terbuka, komunikatif, dan partisipatif akan memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat, yang tercermin dalam meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dan sosialisasi anggaran memiliki peran yang jelas dan signifikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara. Keterbukaan informasi publik terbukti memberikan pengaruh paling kuat, ditunjukkan oleh koefisien regresi 0,577 dengan signifikansi $<0,001$, yang menegaskan bahwa transparansi, aksesibilitas, serta penyajian informasi yang jelas mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Sosialisasi anggaran juga berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 0,379 (Sig. 0,005), menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas penyampaian informasi anggaran mendorong lahirnya pemahaman dan partisipasi publik yang lebih baik. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 82,3% variasi kepuasan masyarakat, sehingga keduanya merupakan aspek kunci dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama yang harus diperkuat, sementara sosialisasi anggaran berfungsi melengkapi pemahaman publik melalui edukasi fiskal yang lebih inklusif.

Dari sisi implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai akuntabilitas publik dan good governance dengan menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi bukan hanya prinsip normatif, tetapi dapat diukur secara empiris sebagai faktor yang menentukan kepuasan masyarakat terhadap tata kelola fiskal daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi melalui optimalisasi portal digital, publikasi data yang lebih mudah diakses, dan responsivitas pelayanan informasi. Selain itu, efektivitas sosialisasi anggaran perlu ditingkatkan melalui variasi metode penyampaian dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Pada tingkat kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas mengenai publikasi informasi keuangan serta penyediaan anggaran yang memadai untuk program sosialisasi, sehingga transparansi fiskal dan literasi masyarakat dapat berjalan beriringan dan menghasilkan peningkatan kepuasan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory Budgeting in Indonesia: from the Policy Innovation to the Democracy Innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Azizah, F. N., Junaidi, J., & Rismawati, R. (2025). Analysis of the Influence of Financial Knowledge on Students' Attitudes in Avoiding Financial Fraud in the Digital Era. SSRN. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5343465>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Caronge, E., Nurzianti, R., Chan, R., Ashlah, I., & Teo, R. (2025). Green Accounting and Corporate Disclosure: Enhancing ESG Transparency in the Digital Age. *Journal Markcount Finance*, 3(2), 193–202. <https://doi.org/10.70177/jmf.v3i2.2498>
- Hasibuan, F. H., Siagian, K. F., & Zein, A. W. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>
- Hidayat, M. N. (2024). Enhancing Accountability And Transparency In Local Governance Through Integrated Information Systems: A Case Study Of Surabaya City, Indonesia. 16(3), 228–238.
- Kamela, H. (2025). Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dengan Kualitas Informasi Sebagai Pemoderasi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1).
- Karfina, L., Haliah, & Nirwana. (2025). Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration. *International Journal of Economic*, 5(2), 2808–4713. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v5i2.2841>
- Lukas, Mahsyar, A., & Nursalim. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1), 1–0. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.10874>
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). Public Involvement in Budget Transparency in terms of Opportunities and Challenges. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 12(2), 171–179. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- Nurhadianto, T., & Sugiri, S. (2022). Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5433>
- Nurhalisa, S., Rismawati, & Ramadhan, A. (2024). The Influence Of Budget Transparency And Public Participation On The Effectiveness Of Budget Management Policies. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 2(1).

- Prakoso, M. T. B., & Rismawati. (2023). Pengaruh Komunikasi, Motivasi Dan Kerjasama Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt Agrodana Futures Surabaya) Rismawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 12(1).
- Purwanti, A., Fresiliasari, O., Alfaruq, Z. A. M., Sudjono, & Sukomardojo, T. (2024). PARTICIPATORY BUDGETING IN EMERGING ECONOMIES: ENHANCING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.58084>
- Ramadhan, S. A., & Pribadi, U. (2024). Building Citizen Satisfaction with E-Government Services: A Case Study of the Population Administration Information System (SIAK). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(3), 972–988. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i3.55866>
- Santoso, R., & Sulisnaningrum, E. (2024). Implementation of Good Governance in Public Sector Accounting: Evaluation of Effectiveness in Local Government. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1). <https://doi.org/10.54204/TAJI/Vol152024011>
- Saputri, D. R., Pujiningsih, S., & Utami, H. (2024). Determinants of Transparency of Local Government Financial Reports in Indonesia. *Oblik i Finansii*, 3(105), 120–131. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3\(105\)-120-131](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3(105)-120-131)
- Saragih, M. A. J., Sari, E. N., & Irfan, I. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 73–86. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Sari, S. P., & Novitasari, W. (2022a). Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19333>
- Sari, S. P., & Novitasari, W. (2022b). Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19333>
- Sawir, M., Azhar, A. A. M., & Susilawaty. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–16. <https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jpp>
- Siahay, A. Z. D. (2023a). Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability: Kajian Literatur Sistematis tentang Peran Transparansi Informasi dalam Tata Kelola Fiskal. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 450–460. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.2680>
- Siahay, A. Z. D. (2023b). Public Accounting As A Pillar Of Financial Governance: A Literature Review On Government Transparency And Accountability Akuntansi Publik Sebagai Pilar Tata Kelola Keuangan: Kajian Literatur Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.15867>

- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2025). The Influence of Public Sector Accounting Systems and Budget Transparency on Quality Financial Reports in Local Governments. *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v10i1.15979>
- Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The Transparency Level of Local Governments in Indonesia: Does the Level of Financial Health Matter? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9, 123–150. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195>